



Prosiding Seminar Nasional

Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Kamis, 6 Oktober 2016

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jamaris, dkk

ISBN 978-602-60486-0-8

Diterbitkan oleh:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

Padang, 6 Oktober 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Padang, 6 Oktober 2016**

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Luar Sekolah 2016
Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Penulis, Jamaris, dkk.
Editor, Syafruddin Wahid
Padang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)
x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016
by Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Cetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,
Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang
Sumatera Barat

ISBN 978-602-60486-0-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (*community learning process*).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (*empowering society*) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat *top down*.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai *self governing community*, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada Oktober 2016. Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen, praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan berdasarkan bidang kajian. Pengelompokkan berdasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi mengelompokkan berdasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prosiding ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di Indonesia.

Padang, Oktober 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

1. **PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI
PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA** oleh
Jamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri
Padang) 1
2. **SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN
PEMBANGUNAN NAGARI** oleh Syafruddin Wahid (Dosen
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 17
3. **PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH DALAM Mendukung PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA** oleh Ismaniar (Dosen Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang) 42
4. **PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh
Alim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 51

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

5. **PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA** oleh Syur'aini
(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 63
6. **PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA** oleh Dayat Hidayat (Dosen Program
Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singaperbangsa
Karawang) 73
7. **PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL** 88

BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN oleh Wirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	
8. PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDAMPINGAN DESA oleh Muhaimin (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang)	97
9. PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN oleh Iswandi (Dosen STKIP YPM Bangko Jambi)	105
10. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MASYARAKAT DESA oleh Elfi Rahmi (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas)	116
PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	
11. MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	125
12. SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN <i>SELF GOVERNING COMMUNITY</i> DI SUMATERA BARAT oleh MHD. Natsir (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	135
13. PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO KNEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X KOTO DISTRICT SOLOK oleh Siti Farida F & Mas'ula (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	144

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. **PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESA PALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB. MALANG)** oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) 150
15. **PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA** oleh Vevi Sunarti (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 166
16. **PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG** oleh Mahfuzi Irwan (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) 183
17. **PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** oleh Marta Dwi Ningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) 198

KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. **URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Tasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 210
19. **PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA** oleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta) 225

KONSEP PEMBELAJARAN

20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	238
--	-----

**SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN
SELF GOVERNING COMMUNITY
DI SUMATERA BARAT**

MHD. Natsir

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP Padang

e-mail: mhdnatsir_yunas@fip.unp.ac.id

Abstract

Surau has big role in public life especially in West Sumatera. Essentially, surau has presented as social formation in people's life. So, it has great contribution to society and become a system that plays an important task in shaping the cultural mentality. These all will certainly promote self governing community in West Sumatera.

Keyword: Surau, Nagari, Self Governing Community

A. PENDAHULUAN

Konsep *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) mempunyai perjalanan yang cukup panjang di Eropa maupun di Indonesia. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama *self governing community*, mulai dari dewan komunitas di Spanyol, *Commune* di Italia, *Parish* di Inggris dan di Indonesia seperti *Lurah* di Jawa, *Lembang* di Tana Toraja, *Kuwu* di Ciroben, *Kampung* di Papua dan di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan *Nagari*.

Suatu *nagari* di Sumatera Barat tidak lengkap dan sempurna apabila tidak memiliki dua institusi yang menjadi lambang *nagari* yaitu balai adat dan mesjid (*surau gadang*). Balai adat adalah lembaga kebudayaan sedangkan mesjid merupakan lembaga agama. Hal ini menggambarkan bagaimana suatu *nagari* dibangun berdasarkan erat-nya hubungan agama dan adat. Sehingga Hamka menyimpulkan bahwa sangat sulit untuk memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Hubungan ini bukan seperti halnya paduan minyak dan air dalam susu. Agama juga bukanlah semata-mata tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau (Azra: 2003). Dalam hal ini, adat dan agama Islam dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat

konstruktif untuk membangun masyarakat nagari dalam mewujudkan *self governing community*.

Di antara institusi agama yang dapat bersinergis untuk mempercepat terwujudnya *self governing community* di Sumatera Barat adalah surau. Karena pada dasarnya basis pembinaan ummat di Sumatera Barat dimulai di surau. Dari suraulah cikal bakal keutuhan dan keutamaan masyarakat Minang beradat dan beragama. Keberhasilan ditandai apabila anak pandai mengaji, taat beribadah, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Memakaikan tata krama adat, pandai petatah petitih adat, menguasai kesenian anak *nagari* serta bela diri (pencak silat).

Di surau, para pemuda Minang dapat mempelajari cara menulis dan membaca Al Qur'an, ilmu agama yang mengajarkan tentang akidah, syari'ah, dan akhlak. Menurut adat yang berlaku di Minangkabau, anak-anak muda menjelang kawin tinggal di surau, dengan sendirinya semua orang Minangkabau masa itu telah pandai membaca Al-Qur'an berikut menulisnya dan secara dasar mengetahui ilmu agama dalam bentuk alamiah dan pengetahuan. Dengan demikian lembaga surau telah membebaskan masyarakat dari buta aksara dan telah berhasil mencetak ulama. Sehingga pada masa lalu telah banyak lahir tokoh pemikir dan diplomat, negarawan, politikus, ulama. Di antara mereka adalah H. Agussalim, M.Yamin, Hamka, M.Hatta, M.Natsir dan lain-lain.

Di samping itu, surau selain menjalankan pendidikan agama, juga mendidik anak muda dalam aktivitas ekonomi. Seperti keterlibatan surau *Tuanku nan Tuo* di bidang perdagangan, sehingga guru ini dijuluki sebagai pelindung para pedagang. *Tuanku Nan Tuo* telah mampu memberikan pendidikan yang tidak saja bersifat tekstual, namun juga mengkombinasikan dan memanifestasikan tekstual kitab pada kontekstual realitas hidup manusia. Dalam khazanah Islam, hal ini disebut dengan kombinasi syari'ah dan fiqih (Hanani: 2002).

B. PEMBAHASAN

1. Relasi Surau dan Masyarakat

Surau dan masyarakat membuat hubungan yang saling menguntungkan (Abidin: 2004). Di antara gambaran dari dekatnya hubungan ini dapat dilihat secara fisik dari bangunan surau yang awalnya tidak diberi pagar. Hal ini merupakan simbol dari persatuan dan kedekatan surau dengan masyarakat (Daya: 1995). Surau juga telah

menumbuhkan sifat demokratis dan keterbukaan dalam masyarakat yang sejak lama menganut sistem *matrilineal* (Jasmi: 1996).

Di samping itu letak geografis surau mencerminkan sifat hubungan antara surau dan komunitas masyarakat secara keseluruhan. Terdapat saling ketergantungan yang kuat antara surau dan masyarakat; surau membutuhkan masyarakat, khususnya untuk mendukungnya secara finansial atau memberikan bantuan ekonomi guna menyelamatkan keberadaannya.

Di pihak lain, masyarakat juga membutuhkan surau bagi pendidikan agama anak-anaknya, juga upacara keagamaan mereka di *nagari* yang biasanya dilakukan orang-orang surau (Azra:2003). Dalam hal ini tentu saja surau yang berhasil menyesuaikan diri dan mendapat penerimaan luas akan memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat (Aziz: 2001).

Surau telah mengisi formasi sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga surau mempunyai eksistensi yang kontributif terhadap masyarakat dan menjadi sebuah sistem yang berperanan penting dalam membentuk mentalitas kultural (Hanani: 2002). Hal ini tentu saja akan banyak mendorong terwujudnya *self governing community* di Sumatera Barat.

Hubungan surau dengan masyarakatnya ibarat dua sisi mata uang (di mana masing-masing keduanya saling membutuhkan). *Orang siak* membutuhkan bantuan biaya dari masyarakat, sedangkan masyarakat memerlukan orang siak untuk mengajarkan agama, dan menjalankan upacara-upacara keagamaan di *nagari* (Azra:2003). Dengan pembaharuan sistem pendidikan agama, dan perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial telah mengaburkan hubungan ini.

2. Tantangan Surau dalam Mewujudkan *Self governing community*

Dalam perkembangannya, sejarah panjang kejayaan surau sebagai salah satu institusi yang dapat membangun masyarakat mulai tergerus. Masyarakat seakan tenggelam dalam pengaruh modernisasi dan gelombang globalisasi yang sedang berjalan. Pembangunan yang seharusnya berkontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat, saat ini seperti dua sisi pisau yang sama tajam dan dapat membuat luka apabila tidak bisa menggunakannya. Kehidupan anak *nagari* terutama

generasi muda sudah banyak yang terpengaruh oleh efek negatif globalisasi dan transformasi (Natsir: 2013).

Nilai luhur yang disemai melalui peran surau telah mundur dan tergusur. Surau telah sepi dan malah ada yang tidak berfungsi lagi. Guru mengaji banyak *urbanisasi* ke kota, ulama-ulama muda banyak yang enggan kembali ke desa, pemangku adat banyak dijabat oleh para birokrat yang bertugas di kota. Dalam hal ini betul apa yang dituliskan Navis (2002) dalam novelnya “robohnya surau kami” yang menggambarkan surau sebagai aset lokal telah hilang; fungsi surau tidak seperti dulu lagi, surau sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, hanya sebagian penduduk *nagari* (terutama generasi muda) yang berkesempatan mengikuti pengajian agama dan lebih sedikit lagi anak-anak yang sempat mengikuti pengajian Al-Qur’an. Akibatnya, nilai dan peranan ajaran agama serta aqidah menjadi lemah. Adat tinggal semboyan, agama dan adat hanya tampil dalam bentuk acara seremonial saja, tidak lagi menjadi acuan kepribadian.

Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi semua masyarakat, khususnya Sumatera Barat. Sehingga surau sebagai salah satu lembaga yang mampu mengkader generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan *self governing community* menjadi terabaikan. Padahal ini dapat diwujudkan dengan keterlibatan intensif surau dalam mewujudkan *self governing community*.

3. Surau dan Perubahan Sosial Masyarakat di Sumatera Barat

Menurut Soekanto (1998) ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, antara lain adalah; 1). Bertambah atau berkurangnya penduduk; 2). Penemuan-penemuan baru; 3). Pertentangan (*conflict*) masyarakat; 4). Terjadinya pemberontakan atau revolusi; hal ini meliputi, *pertama*, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia; *kedua*, peperangan; *ketiga*, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Masyarakat di Sumatera Barat (Minangkabau) merupakan masyarakat yang kooperatif terhadap perubahan (Sairin: 2002). Bagi mereka perubahan sosial dan budaya pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Masyarakat Minangkabau bukanlah masyarakat yang tertutup seperti halnya masyarakat Badui di Jawa Barat atau orang Amish di Amerika Serikat.

Namun dalam perkembangannya, semangat akan perubahan dan meningkatnya aspirasi modernisasi, bahkan sekularisasi dalam masyarakat telah mengakibatkan semakin hilangnya surau dalam masa-masa terakhir ini. Keinginan untuk memasuki alam kemajuan ini dimulai dengan transformasi banyak surau menjadi "*sekolah nagari*" (*volkscholen*) sejak 1870-an. Bahkan modernisasi dan pembaharuan keagamaan pada awal dasawarsa abad 20 semakin membuat surau dipandang oleh banyak masyarakat Minang semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman (Azra: 2002).

Gelombang-gelombang pembaharuan keagamaan dan pendidikan umum telah memberikan andil bagi kemunduran surau sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Seperti pemurnian Islam yang dilancarkan Padri dan kemunculan modernisme Islam *Salafi* pada awal abad ke-20 memunculkan corak Islam yang tidak *kompatibel* dengan tradisi sistem nilai surau. Dalam kondisi seperti ini surau menjadi sasaran dan target pembaharuan, karena surau dipandang memiliki paham dan praktek keagamaan yang tradisional yang tidak sesuai dengan kemajuan, yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan takhyul. Demikian juga, ketika sekolah-sekolah yang didirikan Belanda (*volkscholen*) diperkenalkan kepada masyarakat di Sumatera Barat, dengan cepat mereka meresponi secara positif, karena hal ini dianggap dapat membawa mereka kepada kemajuan. Kondisi ini telah menyeret anak-anak muda semakin menjauh dari pendidikan surau.

Kesempatan yang diberikan pemerintah Belanda untuk mendapat pendidikan bagi masyarakat lokal dari kelas tertentu, telah menghasilkan murid-murid yang terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat. Dalam hal telah terjadi suatu gerakan emansipasi di antara para murid-murid untuk mencapai kemajuan (Tilaar: 2002).

Mereka beranggapan bahwa cara untuk mencapai kemajuan ialah dengan merombak sistem pendidikan tradisional menjadi pendidikan modern *ala* Barat. Karenanya menurut mereka sekolah-sekolah agama sudah ketinggalan zaman (*out of date*), dan harus diganti dengan sekolah-sekolah baru yang modern. Untuk itu, ulama-ulama yang berpengaruh hendaknya tidak lagi mengajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Keinginan seperti ini ditolak oleh kaum ulama tradisional (kaum tua) karena mereka menganggap bahwa ide-ide kemajuan itu dapat mengancam konsepsi adat alam Minangkabau yang selama ini mereka yakini. Menurut mereka kemajuan hanya bisa dicapai dengan

menggali dan mengelaborasi kembali gagasan-gagasan adat dan budaya Minangkabau, bukan meninggalkannya dan menggantikannya dengan gagasan-gagasan Barat.

Sikap ulama tradisional ini berbeda dengan ulama modern (Kaum muda). Di mana mereka semakin *ekspansif* dalam menerapkan gagasan-gagasan mereka. Mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah agama yang telah dimodernisasi, baik sistem, metode maupun kurikulumnya. Pengajaran bukan lagi berlangsung di surau, tetapi sudah di kelas. Metode pengajarannya bukan lagi *halaqah*, tetapi sudah menggunakan sistem kelas yang memiliki tingkatan-tingkatan.

Pembaharuan sistem pendidikan agama, ditambah perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial, juga mengubah watak dasar *orang siak* dan surau. *Pakiah* (murid yang sedang belajar di surau) yang pada masa kejayaan surau belajar agama dari satu surau ke surau lain dengan biaya yang diperoleh dari partisipasi ummat, sekarang harus menjadi murid madrasah modern atas biaya keluarganya. Perubahan ini berarti pecahnya integrasi *orang siak* dengan masyarakat. Padahal sebelumnya kedekatan surau dengan masyarakat, merupakan salah satu keunggulan dari surau yang bisa akrab dan diterima oleh masyarakatnya.

Pada dasarnya, modernisasi pendidikan Islam tidak serta merta melenyapkan peran surau dan sekolah-sekolah agama tradisional yang semata-mata mengajarkan ilmu agama. Tetapi sulit dibantah, bahwa mereka ini semakin tertinggal, sehingga selepas pada 1940-an surau dan sekolah-sekolah agama tradisional menjadi minoritas dibandingkan sekolah-sekolah Islam modern.

Perkembangan ekonomi yang membuka berbagai lapangan kerja baru juga memiliki andil mempersempit pamor surau. Surau sebagaimana dikenal tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan khusus yang bernilai ekonomis dalam sistem ekonomi modern. Surau juga tidak mengeluarkan ijazah bagi *orang siak* sebagai bukti kompetensinya dalam bidang tertentu sebagai guru agama. Sebelumnya hal ini tidak pernah menjadi persoalan, dan ijazah bukanlah suatu hal yang penting. Tuntutan ekonomi telah mengakibatkan meningkatnya kecenderungan orang tua untuk tidak menyerahkan anak-anaknya belajar di surau.

Perkembangan ekonomi dan modernisasi dalam masyarakat juga telah menimbulkan proses sekularisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar kemudian berubah menjadi sekolah umum

dengan kurikulum umum yang paling dominan, dan sebagian lagi berusaha mempertahankan identitasnya sebagai sekolah Islam dengan menempatkan cukup banyak mata pelajaran keislaman di dalam kurikulumnya (Azra: 2002). Kondisi seperti ini telah berimplikasi pada berkurangnya minat masyarakat pada sistem pendidikan surau.

4. Surau dan Upaya Mewujudkan *Self Governing Community* di Sumatera Barat

Pada prinsipnya *self governing community* adalah komunitas lokal *beyond the state*, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. Pengalaman “kembali ke nagari” di Sumatera Barat merupakan eksperimentasi lokal membangun otonomi desa. Sumatera Barat lebih dulu bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, termasuk Jawa, meski kapasitas desa di Jawa mungkin lebih baik ketimbang *nagari* di Sumbar. Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat unik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal. Karena sejak lama orang Minang mempunyai sejarah otonomi yang berbasis pada *nagari*.

Di sepanjang zaman proses desentralisasi di Sumatera Barat berlangsung secara dinamis. Ketika republik Indonesia baru berumur satu dekade, Sumbar telah tampil sebagai penantang gigih sentralisasi melalui PRRI, meski dari pemerintah hal ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang harus ditumpas secara represif. Begitu juga halnya ketika Orde Baru berkuasa, Sumatera Barat kembali tampil sebagai penentang terhadap intervensi dan penyeragaman (*regimentasi*) pemerintahan desa melalui UU No. 5/1979. Masyarakat Sumatera Barat dipaksa menerima intervensi Jakarta, meski mereka merasakan kehilangan identitas politik lokal dan *self governing community* yang sudah lama berbasis pada *nagari*.

Marginalisasi terhadap *nagari* mulai bergeser menjadi eforia ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul berakhirnya Orde Baru. Sejak 1998, Sumatera Barat menemukan momentum sambil melakukan respons yang cepat terhadap isu desentralisasi. Salah satu jargon yang selalu disuarakan terkait terkait isu desentralisasi di Sumatera Barat adalah “*kembali ke nagari*”, yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralistik dan demokratis. Setelah melewati dialektika yang panjang, Propinsi Sumbar mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif pada bulan Januari 2001.

Kini pembentukan kembali (*recreating*) *nagari* di wilayah kabupaten telah selesai dilakukan. Prinsipnya adalah membentuk “nagari baru” yang menggabungkan antara *self governing community* (otonomi asli yang berbasis adat) dan *local-self government* (desentralisasi dari pemerintah). Pola penggabungan ini adalah format baru yang memungkinkan terjadinya “rekonsiliasi” antara “desa adat” dengan “desa dinas” yang dibentuk oleh negara.

Dalam hal ini, untuk mempercepat terwujudnya *self governing community* yang matang. Maka institusi surau sebagai bagian dari lembaga yang akan banyak mempengaruhi pola pikir dan cara bersikap masyarakat di Sumatera Barat dirasa sangat perlu untuk mengambil peran yang lebih aktif. Hal ini dimaksudkan agar persoalan-persoalan yang seringkali timbul dalam masyarakat terkait dengan *self governing community* bisa diminimalisir. Sehingga arah pembangunan masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat lebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara anesia pada umumnya dapat lebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara aset masyarakat setempat.

C. SIMPULAN

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai usaha membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan *individual capability development*, *organizational capacity building*, dan *institutional capacity building*. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati agar penguatan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif.

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan diharapkan dapat menggerakkan para pihak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugas dan wewenang sehingga system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Mas'ood. 2004. *Surau Kito*. Padang: PPIM.
- Aziz, Imam. dkk (Ed.). 2001. *Agama dan Perubahan Sosial ; Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM.
- Azra, Azyumardi. 2003. *SURAU; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Daya, Burhanuddin. 1995. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Hanani, Silfia. 2002. *Surau; Aset Lokal yang Tercecer*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Navis, Ali Akbar. 1999. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Jakarta: Grasindo
- Sairin Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.